



**PENGARUH PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN DANA
PERIMBANGAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024)



ARIFA ILMIYATI
NIM. 4321091

2025

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
DANA PERIMBANGAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

ARIFA ILMIYATI
NIM. 4321091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
DANA PERIMBANGAN SEBAGAI VARIABEL**

MODERASI

**(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

ARIFA ILMIYATI

NIM. 4321091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifa Ilmiyati

NIM : 4321091

Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Arifa Ilmiyati

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Arifa Ilmiyati

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Arifa Ilmiyati**
NIM : **4321091**
Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Mei 2025
Pembimbing


Devy Arisandi, M.M.
NIP.198808282020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

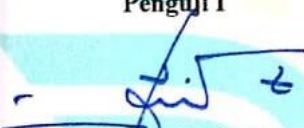
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : Arifa Ilmiyati
NIM : 4321091
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024)
Dosen Pembimbing : Devy Arisandi, M.M.

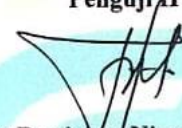
Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji

Penguji I


AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

Penguji II


Jilma Dewi Ayu Ningtvas, M.Si.
NIP. 199101092020122016

Pekalongan, 17 Juni 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

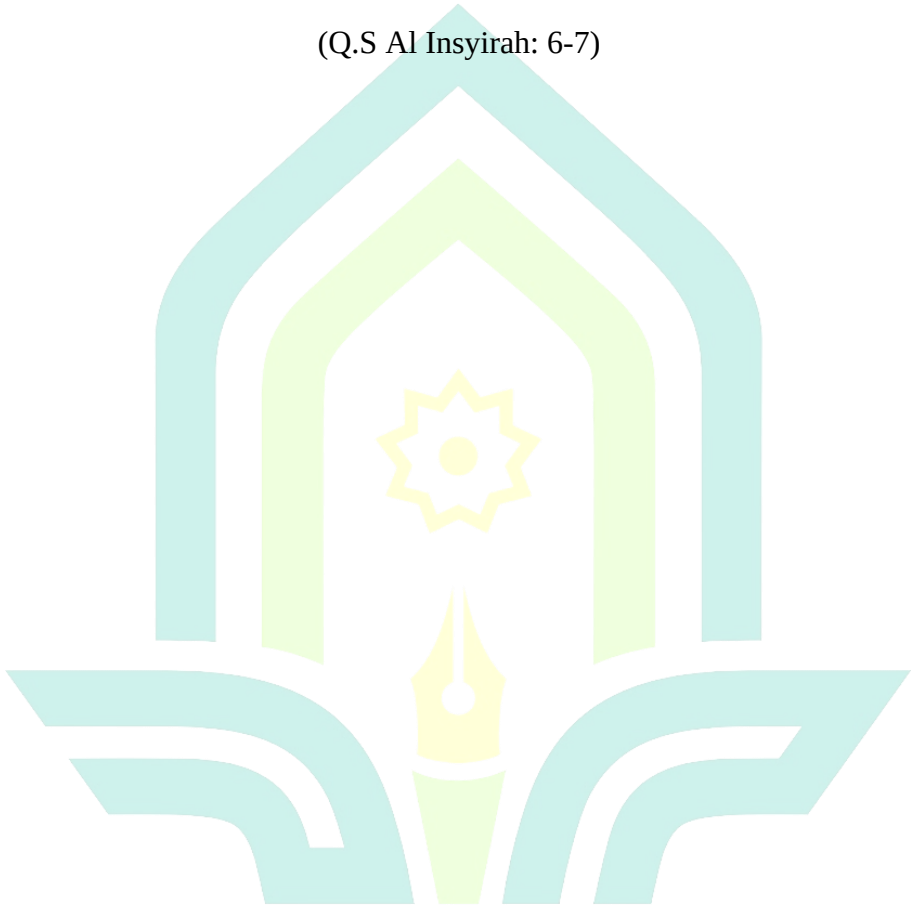

Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

Setiap manusia mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk mencapai kesuksesannya.

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah: 6-7)

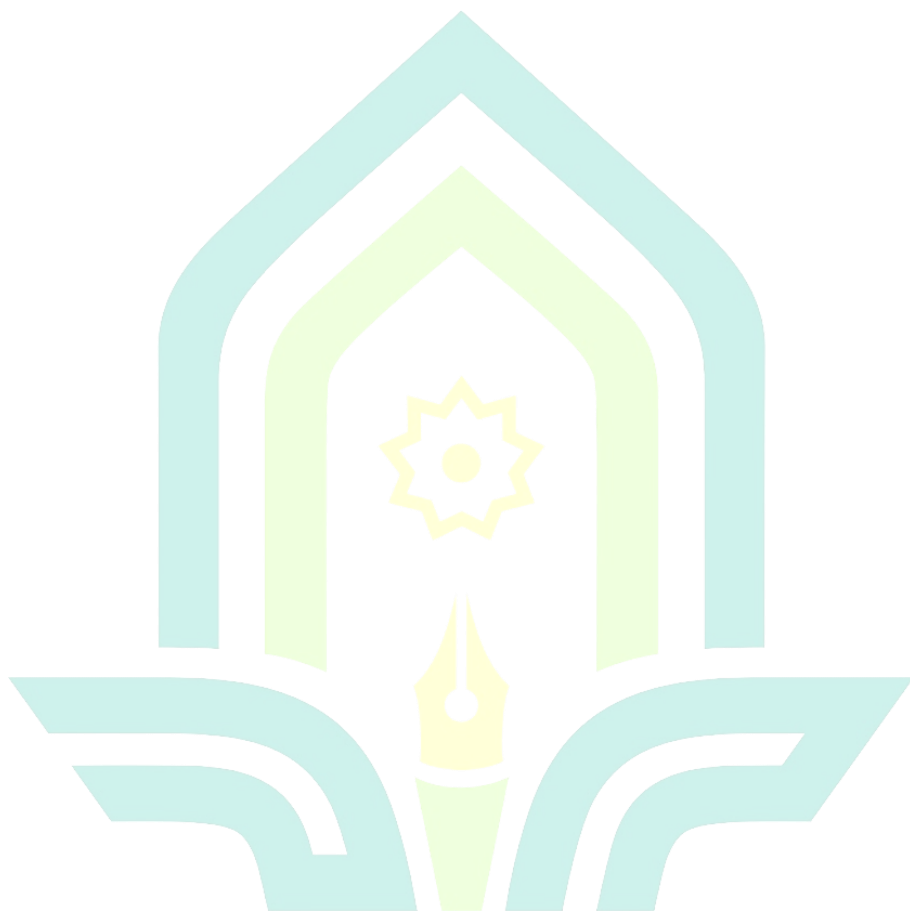


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Marsono dan Ibu Jaetin yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan setiap langkah penulis dalam menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak penulis tersayang, Casdari, Wahidin, dan Tri Setiyowati yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Almamater penulis Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Ibu Devy Arisandy, M.M yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Wali Ibu Farida Rormah, M.Sc yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Sahabat, kerabat, dan teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

7. Teman-teman aksya angkatan 2021 dan teman-teman KKN 59 kelompok 20 yang telah menjadi tempat berproses selama berada di bangku perkuliahan.
8. Diriku sendiri, terimakasih telah mampu untuk mewujudkan mimpimu dan mimpi kedua orang tuamu dengan segala perjuangan dalam perjalananmu.



ABSTRAK

ILMIYATI, A. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024).

Kemandirian Keuangan Daerah menjadi indikator penting dalam desentralisasi fiskal, mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk terciptanya Kemandirian Keuangan Daerah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sampel penelitian ini berjumlah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling* jenuh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan *software* eviews13.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

ILMIYATI, A. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024).

Regional Financial Independence is an important indicator in fiscal decentralization, reflecting the ability of regions to finance regional expenditures without relying too much on transfers from the central government. Therefore, local governments must continue to optimize the management of regional financial resources to create good Regional Financial Independence. This study aims to determine the effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Regional Expenditures on Regional Financial Independence and to determine whether the Balance Fund can moderate this influence.

This research is a type of quantitative research using secondary data from the Regency / City APBD report in East Java Province. The data collection technique in this study used documentation techniques. The sample of this study amounted to 38 regencies / cities in East Java Province with a sampling technique that is saturated sampling. The data analysis method used in this study is panel data regression analysis with evIEWS13 software.

The results showed that local taxes and levies have a positive and significant effect on Regional Financial Independence. Regional Expenditure has no effect on Regional Financial Independence. The Balance Fund can moderate by weakening the effect of Local Taxes on Regional Financial Independence. The Balance Fund cannot moderate the effect of Regional Retribution and Regional Expenditure on Regional Financial Independence.

Keywords: Local Taxes, Local Levies, Local Expenditures, Balance Funds, Regional Financial Independence.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

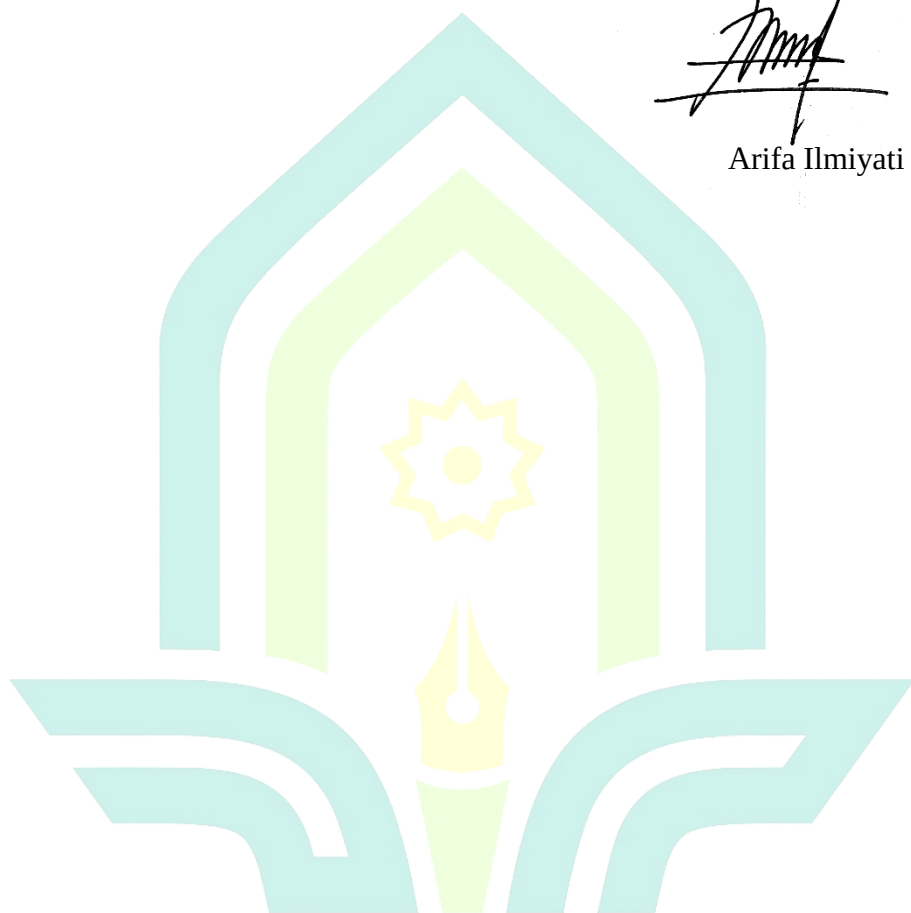
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Devy Arisandi, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Farida Rohmah, M.Sc. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
7. Bapak Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dosen Penguji 1, dan Ibu Jilma Dwi Ayu Ningtyas, M.Si. selaku Dosen Penguji 2.
8. Orang tua tersayang dan keluarga saya tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 29 Mei 2025



Arifa Ilmiyati



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat.....	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	12
LANDASAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori.....	12
B. Telaah Pustaka	22
C. Kerangka Berpikir	33
D. Hipotesis.....	34
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Setting Penelitian.....	40

D. Populasi Dan Sampel.....	40
E. Variabel Penelitian.....	42
F. Sumber Data.....	46
G. Teknik Pengumpulan Data.....	46
H. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV.....	52
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi/ Subjek Penelitian.....	52
B. Analisis Data Dan Pembahasan.....	52
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Keterbatasan Penelitian.....	84
C. Implikasi Teoritis dan Praktis.....	85
D. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	I
1. Lampiran 1 Data Penelitian (Dalam Miliar Rupiah).....	I
2. Lampiran 2 Analisis Deskriptif.....	XV
3. Lampiran 3 Pemilihan Model.....	XV
4. Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik.....	XVII
5. Lampiran 5 Uji MRA.....	XIX
Lampiran 6 RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	XX

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- يَذْهَبُ yazhabu
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ ا...َ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- مَيَّ ramā
- قِيلَ qīla

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudatulatfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا rabbanā
- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr
- الْحَجَّ al-ḥajj

F. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- السَّيِّدُ as-sayyidu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الْبَدِيعُ al-badi'u
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ ta'khuzūna
- النَّوْءُ an-nau'
- شَيْءٌ syai'un
- إِنَّ inna
- أُمِرْتُ umirtu
- أَكَلَ akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf

Contoh:

- | | | |
|---|--|--|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ لِّلرَّازِقِينَ | Wainnallāha lahuwa
khairar-rāziqīn |
| - | وَإِذَا فُتِنُوا بِالْأَمْرِ الْكَبِيرِ | Wainnallāha lahuwa
khairrāziqīn |
| - | وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | Wa auf al-kaila wa-
almīzān |
| - | وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | Wa auf al-kaila wal
mīzān |
| - | إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | Ibrāhīm al-khalīl |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | Ibrāhīm al-khalīl |
| - | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ | Bismillāhi majrehā wa
mursahā |
| - | إِلَيْهِ سَبِيلًا | Walillāhi ‘alan-nāsi hijju
al-baiti manistaṭā’a |
| - | | ilaihi sabīla |
| - | | Walillāhi ‘alan-nāsi
hijjul-baiti manistaṭā’a |
| - | | ilaihi sabīlā |

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Inna awwalabaitinwuḍi
'alinnāsilallaḥibibakkatamubārakan
- وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn
Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn
Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مَنْ أَلَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrunminallāhiwafathunqarīb
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعاً Lillāhi al-amrujamī'an
Lillāhil-amrujamī'an
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhabikullisyai'in 'alīm

J. Tajwid

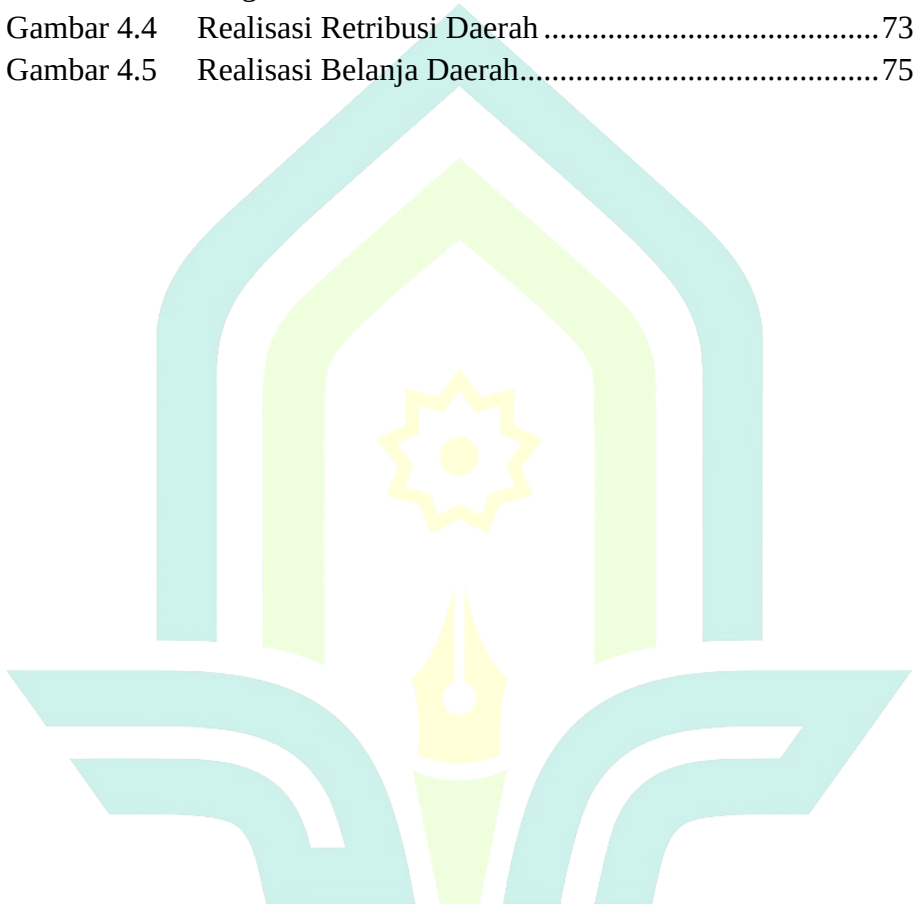
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Transliterasi Konsonan	xiv
Tabel 0.2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xvi
Tabel 0.3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xvi
Tabel 0.4	Tabel Transliterasi Maddah	xvii
Tabel 1.1	Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah	6
Tabel 2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	15
Tabel 2.2	Telaah Pustaka	22
Tabel 3.1	Populasi	41
Tabel 3.2	Definisi Operasional	43
Tabel 4.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.2	Hasil Uji Chow	55
Tabel 4.3	Hasil Uji Hausman	55
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas	57
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.6	Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel	58
Tabel 4.7	Hasil Uji T	60
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 4.9	Hasil Uji MRA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	44
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	33
Gambar 4.1	Realisasi Pajak Daerah.....	69
Gambar 4.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	69
Gambar 4.3	Tingkat Kemandirian Daerah.....	70
Gambar 4.4	Realisasi Retribusi Daerah	73
Gambar 4.5	Realisasi Belanja Daerah.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian.....	I
Lampiran 2	Analisis Deskriptif.....	XV
Lampiran 3	Pemilihan Model	XV
Lampiran 4	Uji Asumsi Klasik	XVII
Lampiran 5	Uji MRA.....	XIX
Lampiran 6	Riwayat Hidup Penulis.....	XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia memisahkan wilayah dalam daerah provinsi, yang selanjutnya dipisahkan lagi menjadi wilayah kabupaten dan kota. Setiap pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah masing-masing yaitu diberikan hak, wewenang, serta kewajiban mengurus segala urusan pemerintahan tanpa adanya pemerintah pusat yang campur tangan, baik dalam hal pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat daerah kabupaten/kota demi kemajuan dan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat dengan segala potensi yang dapat terus digali dari setiap daerah (Novianti & Apriliawati, 2022). Otonomi daerah pertama kali dilaksanakan setelah dicetuskannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Khoirunnisa & Sofilda, 2023).

Setiap pemerintah daerah telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat dan masyarakat daerah untuk mengelola keuangan daerah demi terwujudnya cita-cita daerah. Pemerintah daerah harus menjaga kepercayaan tersebut tanpa adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, Seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui,” (Q.S Al-Anfal [8]:27)

Ayat dari surat Al-Anfal tersebut menjelaskan kepada kita untuk senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita dan menjalankan amanah tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Pada penelitian ini dapat dikaitkan dengan pemerintah daerah yang telah diberikan telah diberi amanah dan tanggungjawab oleh pemerintah pusat dan masyarakat agar bisa mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa menjaga dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan tersebut dengan baik atau dengan cara mengelola sumber pendapatan daerah untuk Belanja Daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan yang otonom yakni guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanannya terhadap masyarakat, dan pembangunan daerah. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing setiap daerah melalui program-program yang telah dirancang setiap pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat menurunkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan menjadikan daerah yang lebih mandiri (Novianti & Apriliawati, 2022). Kemandirian Keuangan Daerah ditandai dengan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai semua operasionalnya, pembangunan daerah, dan layanan masyarakat (Ermawati & Aswar, 2020). Kemandirian daerah dalam otonomi daerah dapat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya perekonomian daerah untuk pembangunan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan dan membiayai operasi pemerintahan merupakan faktor utama yang menentukan dapat atau tidaknya daerah tersebut menerapkan otonomi daerah (Paradintya & Fauzi, 2022).

Menurut evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 di Indonesia hanya 2% pemerintah daerah yang

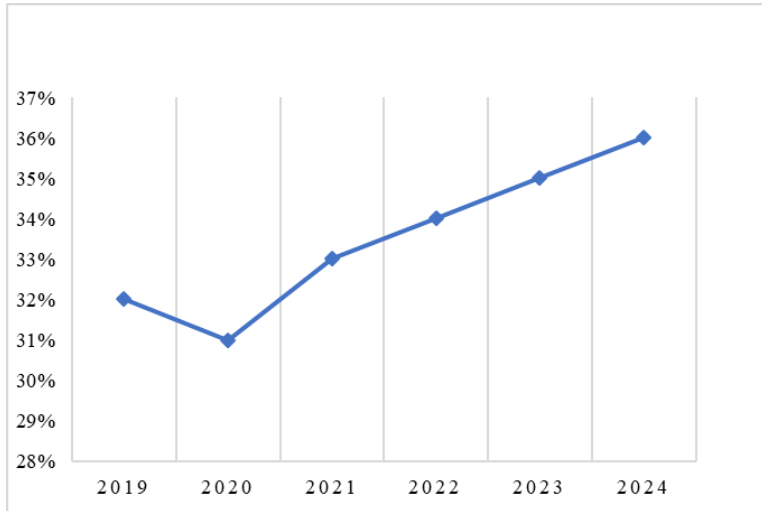
dikategorikan mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi satu-satunya wilayah yang tercatat dengan kemandirian fiskal sedangkan empat daerah lainnya menuju mandiri seperti Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto. Nyoman Adhi Suryadnyana selaku anggota BPK Jatim mengatakan bahwa pajak yang masih condong dibayarkan ke pemerintah pusat menjadi salah satu faktor sulitnya Jawa Timur mewujudkan kemandirian daerah. Meskipun demikian, penggunaan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif sesuai dengan ketentuan hukum akan berkontribusi pada peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah (Mubyarsah, 2022).

Jawa Timur diharapkan dapat menjadi pendorong *leadership* Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan tata kelola dan Kemandirian Keuangan Daerah. Tiga alasan Jawa Timur sebagai *leader* ETPD antara lain: 1) penduduk Jawa Timur didominasi milenial dan generasi Z, 2) Jawa Timur adalah penyumbang ekonomi terbesar kedua di Jawa dengan kontribusi lebih dari 25%, dan 3) ekosistem ekonomi digital Jawa Timur relatif maju (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). Selain itu, tahun 2023 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 32,31%, dengan capaian PAD tersebut, nilai kemandirian daerah tahun 2023 yaitu sebesar 33% (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023).

Untuk terwujudnya daerah yang mandiri selain Kota Surabaya, Pemerintah Jawa Timur terus melakukan penguatan perekonomian melalui desa dengan melakukan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program Desa Wisata Mandiri dan Sejahtera. Di Indonesia total desa mandiri mencapai 17.207 desa mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa tahun 2024, jumlah desa mandiri di Jawa Timur tercatat sebanyak 4.019 desa mandiri. Jumlah ini meningkat 43,54% atau sebanyak 1.219 dari tahun 2023 yaitu sebanyak 2.800 desa mandiri. Hal ini membuat Jawa Timur menduduki peringkat

pertama dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia. (Dinsos Jatim, 2024).

Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah 2025)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian daerah Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 32% yang kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan 1%, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat itu, sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah juga ikut terdampak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan terus gencarnya pemerintah Jawa Timur dalam menyelenggarakan program daerah yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah, kondisi ini bermakna bahwa Provinsi Jawa Timur mampu bangkit setelah adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia dari tahun 2019 dan mulai masuk Indonesia pada 2020. Jika dilihat dari gambar tersebut nilai kemandirian tahun 2022 meningkat menjadi 34% dibandingkan 2021 yang hanya 33%. Dalam kategori kemandirian daerah, nilai kemandirian di Jawa Timur ini masih tergolong rendah, akan tetapi dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang baik terutama dari penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah akan memberikan dampak baik untuk tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kedepannya. Pengelolaan Belanja Daerah yang efektif dan efisien juga akan memberikan dampak yang signifikan juga terhadap tingkat kemandirian daerah.

Sumber keuangan utama daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah disebut sebagai bagian terpenting dalam pendanaan daerah. Selain itu, pemerintah pusat turut mendukung keuangan daerah melalui dana perimbangan dari negara kepada daerah yang disesuaikan dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah (Lukitawati & Pringgabayu, 2020). Pemerintah daerah mengeluarkan Pendapatan Asli Daerah guna mendanai segala kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, potensi pendapatan daerah harus digali lebih lanjut guna meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, tetapi penting untuk diingat bahwa ada undang-undang dan peraturan yang mengaturnya. Pembangunan dan pengembangan masing-masing daerah akan dipengaruhi oleh kapasitas daerah tersebut dalam menggali Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkannya akan berdampak pada berkurangnya ketergantungan setiap daerah terhadap pemerintah pusat (Febriyanti & Faris, 2019).

Pajak dan retribusi daerah yang di Indonesia saat ini telah menjadi sumber utama pendapatan daerah dan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah (Febriyanti & Faris, 2019). Kenaikan dan penurunan pajak dan retribusi akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya akan berdampak pada penerimaan Dana Perimbangan dan penggunaan Belanja Daerah, karena pemerintah menyesuaikan pengeluaran belanja dengan pendapatan yang dihasilkan. Perubahan distribusi pengeluaran akan berdampak pada pembangunan daerah. Selain itu penurunan Pendapatan Asli Daerah juga berdampak pada semakin tingginya Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi. Daerah dengan realisasi pajak dan

retribusi yang besar akan menerima Dana Perimbangan yang lebih kecil sehingga akan memiliki kemandirian keuangan yang lebih tinggi sebagai hasil dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besar (Sulistyawati *et al.*, 2024).

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retrubusi Derah	Belanja Daerah
2019	9,96	1,44	95,21
2020	8,85	1,13	90,33
2021	9,87	1,08	93,10
2022	11,43	1,17	100,75
2023	12,40	1,21	104,32
2024	13,26	6,18	107,50

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah 2025)

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah. Pada tahun 2020 nilai realisasi pada ketiga kategori tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, hal ini seiring dengan adanya pandemi Covid -19 yang melanda seluruh dunia saat itu. Nilai realisasi tersebut kembali meningkat pada tahun 2021 meskipun nilai realisasi Retribusi Daerah kembali menurun sebesar 0,31 triliun. Penurunan ini tidak terlalu signifikan memengaruhi nilai retribusi yang ada, karena nilai realisasi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Daerah pada tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan, dari semula masing-masing bernilai 11,43 triliun, 1,17 triliun, dan 100,75 triliun menjadi realisasi Pajak Daerah sebesar 13,26 triliun, Retribusi Daerah 6,18 triliun, dan Belanja Daerah 107,50 triliun.

Pada tahun 2024 Jawa Timur berhasil merealisasikan pendapatan daerah mencapai 109,71% atau sebesar 35,28 triliun dari target 32,16 triliun. Untuk realisasi Belanja Daerah tahun 2024 mencapai 96,63% atau sebesar 34,74 triliun dari total anggaran 35,95 triliun. Selanjutnya, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) didapatkan Pemprov Jawa Timur atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Sejak tahun 2015, ini merupakan opini WTP kesepuluh kalinya secara berturut-turut (BPK, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati *et al.*, (2024) menunjukkan hasil secara positif dan signifikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Kurniawan *et al.*, (2018) memberikan hasil sebaliknya yaitu Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Penelitian Urfah, (2024), Nainggolan *et al.*, (2023), Tyas, (2022), dan Sutrisno & Santoso, (2021) dengan hasil tidak memiliki pengaruh signifikan antara Retribusi Daerah kepada kemandirian daerah. Penelitian yang dilakukan Suherman *et al.*, (2023) tentang Belanja Daerah di Provinsi Jambi menunjukkan hasil Belanja Daerah dapat berpengaruh positif signifikan pada kemandirian keuangan. Karena belum banyak yang meneliti tentang Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah maka peneliti membandingkannya dengan belanja modal sebagai *research gap* karena belanja modal merupakan bagian dari Belanja Daerah. Penelitian yang dilakukan Andriana, (2020) menunjukkan hasil belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan penelitian Sarumaha & Annisa, (2023) dan Rivandi & Anggraini, (2022) menunjukkan hasil belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Nainggolan *et al.*, (2023) dan Sutrisno & Santoso, (2021) menunjukkan hasil belanja modal tidak berpengaruh signifikan kemandirian daerah.

Bentuk keterbaharuan dari penelitian ini yaitu digunakannya Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian yang membahas tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah masih belum ada yang menggunakan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi. Penggunaan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini didasarkan pada perannya yang signifikan dalam

keuangan daerah. Dana Perimbangan yang mencakup DAU, DAK, dan DBH, dapat memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap kemandirian keuangan. Variabel Dana Perimbangan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh PAD, seperti pajak dan retribusi terhadap kemandirian. Selain itu, Dana Perimbangan juga dapat memoderasi pengaruh Belanja Daerah, di mana ketergantungan pada Dana Perimbangan dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, Dana Perimbangan juga menjadi faktor penting dalam menganalisis Kemandirian Keuangan Daerah.

Informasi latar belakang yang disebutkan di atas membuat tidak mungkin untuk membandingkan hasil penelitian tentang kemandirian keuangan daerah di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki sumber pendapatan daerahnya masing-masing sehingga tingkat kemandirian keuangan setiap daerah juga berbeda. Karena adanya *research gap* yang terjadi dalam penelitian sebelumnya maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang Kemandirian Keuangan Daerah dengan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah serta dengan menambahkan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi dan merupakan bentuk keterbaharuan dalam penelitian. Oleh karenanya penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
5. Apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
6. Apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu jauh dari pembahasan tertulis maka diperlukan pembatasan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Data analisis berdasar pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019-2024.
2. Pemerintahan daerah yang diteliti yaitu pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
3. Penggunaan variabel independen (X) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah menjadi variabel dependen (Y), serta variabel moderasi (Z) yakni Dana Perimbangan.

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

- a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- c. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- d. Pengaruh Dana Perimbangan sebagai variabel yang memoderasi Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

- e. Pengaruh Dana Perimbangan sebagai variabel yang memoderasi Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- f. Pengaruh Dana Perimbangan sebagai variabel yang memoderasi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Dasar bagi sebuah penelitian yaitu memiliki manfaat yang dapat diimplementasikan setelah hasil penelitian mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini meliputi:

- a. Manfaat Teoritis
 - i. Untuk memperluas wawasan pemikiran dan teori ilmu pengetahuan di sektor publik, khususnya pemahaman Kemandirian Keuangan Daerah dengan faktor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah serta Dana Perimbangan sebagai penerimaan daerah.
 - ii. Penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai referensi bacaan oleh para akademisi maupun penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai Kemandirian Keuangan Daerah dan dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - i. Bagi pemerintah daerah, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan data penilaian kepada pemerintah daerah guna mendorong tingkat kemandirian daerah melalui pertambahan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pendanaan daerah, serta pemanfaatan Belanja Daerah.
 - ii. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini mampu menjadi rekomendasi terbaru bagi penelitian yang

mendalam oleh para akademisi untuk memperoleh pemahaman lebih baik tentang Kemandirian Daerah melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dijelaskan mengenai susunan latar belakang permasalahan yang kemudian dikembangkan dalam sebuah rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai penggunaan teori yang berperan sebagai landasan dalam penelitian, telaah pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, hasil dari analisis data penelitian, dan pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
3. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
4. Dana Perimbangan dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
5. Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
6. Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah sebagai variabel independen dan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi.

2. Ruang lingkup penelitian yang terbatas dan hanya terfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode 6 tahun yaitu dari tahun 2019-2024.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan elemen-elemen yang memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini berfungsi masukan dan bahan evaluasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta pemerintah daerah lainnya agar dapat terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi guna meningkatkan kemandirian daerah. Selain itu juga pemerintah daerah harus konsisten dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisiensi agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah.

D. Saran

Bagi Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur disarankan untuk mengintensifkan upaya penggalan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun hasil penelitian menunjukkan Dana Perimbangan tidak memoderasi pengaruh Retribusi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tetap krusial untuk kemandirian fiskal. Selain itu, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah harus terus ditingkatkan dengan memprioritaskan alokasi pada program-program produktif yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan Dana Perimbangan juga harus dilakukan secara strategis, tidak sekadar sebagai penutup defisit, melainkan sebagai

katalisator untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode observasi lebih dari lima tahun guna menangkap tren jangka panjang dan mengurangi efek anomali data. Penting juga untuk menambahkan variabel moderasi atau kontrol lain yang mungkin memengaruhi hubungan antar variabel. Kemudian melakukan penelitian komparatif di berbagai provinsi akan memperluas generalisasi hasil dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA Press UIN SUNAN KALIJAGA.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 105–113.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Anggota VI BPK RI Dorong Kemandirian Fiskal di Jawa Timur dalam Forum Komunikasi Steakholder*. Jatim.Bpk.Go.Id. <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/anggota-vi-bpk-ri-dorong-kemandirian-fiskal-di-jawa-timur-dalam-forum-komunikasi-stakeholder/>
- BPK. (2025, May 6). *Provinsi Jawa Timur Kembali Raih Opini WTP*. Jatim.Bpk.Go.Id.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., Donaldson, L., & Davis, J. H. (1997). Toward A Stewardship Theory Of ManagementT. *Academy of Management*, 22(1), 20–47.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu (Pertama)*. Kencana.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47.
- Dinsos Jatim. (2024). *Melesat Hingga 4.019 di 2024, desa Mandiri Di Jatim Konsisten Tertinggi Se-Indonesia*. Dinsos Jatim. dinsos.jatimprov.go.id
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2023*. Kemenkeu.Go.Id. <https://kemenkeu.go.id>
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European*

Journal of Business and Management Research, 5(1), 1–5.
<https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>

- Febriayanti, F., & Faris, M. (2019). PEengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding Senapan*, 1(1), 61–69.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbin Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Analysis Of Factors Affecting Regional Financial Independence In The Framework Of A Policy Strategy For Increasing Regional Original Income. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 2(4), 777–796.
- Hardani, Sukmana, D. J., Andriani, H., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Illyasa, N. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022)*. Universitas Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (2004).
- Khoirunnisa, M., & Eleonora Sofilda. (2023). Determinasi

Kemandirian Daerah Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3823–3832.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18177>

- Kurniawan, D., Rifa, D., & Fuziati, P. (2018). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi empiris pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 12(1).
- Kusumaningtyas, E., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan EvIEWS*. Academia Publication.
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 1–11.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Terbaru 20). CV Andi Offset.
- Mubarak, R. (2021). *Pengantar Ekonometrika* (1st ed.). Duta Media Publishing.
- Mubyarsah, L. R. (2022). *Surabaya Satu-satunya Wilayah Mandiri Fiskal di Jawa Timur*. JawaPos.Com.
<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01371427/surabaya-satusatunya-wilayah-mandiri-fiskal-di-jawa-timur>
- Nainggolan, A., Sidauruk, T. D., & Tito, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 8(1), 1–10.
- Nani. (2022). *Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan EvIEWS*. CV Visi Intelegensia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah, (2022).

- Novianti, R., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 196–206.
- Paradintya, B. U., & Fauzi, H. H. (2022). the Effect of Regional Financial Performance on Regional Financial Independence in the Province of Central Java. *Marginal Journal of Management Accounting General Finance and International Economic Issues*, 2(1), 230–242. <https://doi.org/10.55047/marginal.v2i1.386>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (2006).
- Putri, R. C. C. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013-2020*. Universitas Pakuan.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831–6842.
- Sahir, S. H. (2021). *metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sakinah, N., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6008–6021.
- Saraswati, N. P., & Nashirotn Nisa Nurharjanti. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.

- Sarumaha, M., & Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *JKA : Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111.
- Siagian, A. R., & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020. *E-Proceeding of Management*, 9(5), 3095–3104.
- Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik Dan Praktik* (Monalisa (ed.)). Rajawali Pers.
- Suherman, Herlin, F., Neldawaty, R., & Yanda, R. A. (2023). Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research Vol. 7, No.2*, 7(2), 225–238.
- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akutansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Sutrisno, M. T., & Santoso, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel. *Majalah Inspiratif*, 7(13), 79–99.
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277–290.
- Tyas, F. A. S. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020*.

Universitas Tidar.

- Urfah, S. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Transfer Ke Daerah (TKD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014 – 2023)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yanti, N. W. (2020). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Yulia, D., Abbas, D. S., & Jayanah, A. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 72–84.
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Mandala Pers.

